

Hassanuddin Mas'ud Sebut Kaltim Butuh IKN, Banyak Proyek Nasional Dikerjakan di Kalimantan

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur masih membutuhkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai motor penggerak ekonomi hingga sosial masyarakat. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud sendiri menegaskan adanya IKN di Kaltim membuat kemajuan signifikan. Pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan yang terkoneksi dengan IKN, dibangun untuk konektivitas nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan. “Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Hasanuddin Mas'ud di tengah kabar pemangkasan anggaran untuk IKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasanuddin, juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mewujudkan Kaltim sebagai provinsi yang maju dan sejahtera dengan adanya IKN di provinsi ini. Politisi Golkar yang akrab disapa Hamas ini juga menegaskan IKN bukan hanya dibutuhkan, tetapi juga kebanggaan bagi Kaltim, karena keberadaannya membawa dampak positif bagi seluruh wilayah di Indonesia. IKN diharap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Diharapnya, Kaltim juga bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. “Program pemerataan pembangunan semakin nyata. Dulu pembangunan terpusat di Pulau Jawa, sekarang banyak proyek nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tentu pembangunan IKN akan mendorong transformasi ekonomi dan menjadikan Kaltim sebagai sumber ekonomi baru bagi Indonesia,” terangnya. Hamas turut menyampaikan, berbagai capaian di sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemajuan pesat dibanding tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk tiga besar secara nasional. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penggerak membuka potensi ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. “Kenaikan IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Kaltim naik dari 78,20 pada tahun 2023 menjadi 78,79 pada tahun 2024, menempatkan kita di posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tandasnya.

Investasi

Sementara itu juga, dampak dari keberadaan IKN di sisi investasi Kaltim juga terasa manfaatnya, IKN jadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai investasi Bumi Etam. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim,

Fahmi Prima Laksana menyebut, keberlangsungan IKN menarik para calon penanam modal baik dalam negeri dan asing untuk berinvestasi. Capaian realisasi investasi Kaltim hingga Triwulan III Tahun 2024 sudah mencapai Rp55,82 triliun. Jika dirincikan, realisasi investasi Triwulan III tahun 2024 terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp38,65 triliun. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp17,16 triliun. “Dampak positifnya (keberadaan IKN) ya bisa dilihat dari angka investasi Kaltim yang terus meningkat,” sebutnya.

Sejak ditetapkan menjadi lokasi baru Ibu Kota Negara Indonesia, tercatat realisasi Kaltim terus mengalami peningkatan hingga tahun-tahun berikutnya. Capaian investasi pada tahun 2020 sebesar Rp31,38 triliun. Tahun 2021 realisasi investasi meningkat di angka Rp41,17 triliun, kemudian tahun 2022 kembali menanjak dengan mencapai Rp57,76 triliun. Pada tahun berikutnya di 2023 kembali naik menjadi Rp71,89 triliun.

Masa Transisi

Politisi Partai Gerindra Kaltim, Agus Suwandy mengajak semua lapisan masyarakat mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di tengah transisi kepemimpinan. Pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi I dan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kaltim ini mengajak sama-sama membangun Bumi Etam, khususnya juga dalam menyiapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi ini. Stabilitas dan kondusivitas daerah, juga penting terjaga di Kaltim adanya IKN.

Ia berpendapat, keberhasilan proyek strategis nasional ini juga bergantung pada kesiapan dan dukungan semua masyarakat Kaltim. “Adanya IKN, kita harus memastikan daerah tetap kondusif agar pembangunan berjalan optimal. Ini bukan hanya proyek pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk memastikan transisi berjalan lancar,” tegasnya.

Pemerintah pusat menarget pemindahan pemerintahan ke IKN pada Agustus 2028 mendatang. Hal ini menurutnya juga penting untuk semua elemen, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta bersiap agar Kaltim benar-benar bisa menjalankan peran barunya sebagai provinsi yang menyangga Ibu Kota Negara. “Kita harus memastikan semua persiapan berjalan maksimal. Pemerintah pusat tentu telah memperhitungkan segala aspek, termasuk infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Kita harapkan perpindahan ini benar-benar terealisasi sesuai rencana,” tegasnya.

Di samping itu, Kaltim yang telah menggelar Pilkada Serentak 2024 dengan terpilihnya Rudy Mas'ud – Seno Aji sebagai gubernur dan wakil gubernur, diharap Agus Suwandy juga bisa membawa perubahan positif dan mempercepat pembangunan daerah. Sinergi dan peran aktif semua pihak dalam mewujudkan Kaltim sebagai pusat pemerintahan Indonesia di masa depan harus bisa dilakukan demi mewujudkan provinsi yang lebih maju dan siap menyambut perannya sebagai pusat pemerintahan nasional.

“Setelah pelantikan nanti, harus merangkul semua pihak, baik yang terpilih maupun yang belum terpilih, demi kemajuan Kaltim ke depan. Pilkada sudah usai, ini saatnya kita semua bersama-sama membangun daerah,” pungkasnya. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran kementerianya untuk proyek IKN diblokir. Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2). “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody. Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang. “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Angka ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp60,6 triliun. Pengajuan tersebut meliputi alokasi untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp9,9 miliar untuk pembangunan jalan di KIPP, jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II. Selain itu, alokasi untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp4,969 miliar untuk penyelesaian SPAM, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.

Namun, harapan penambahan anggaran pupus setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Akibatnya, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp81,38 triliun, menyisakan anggaran hanya Rp29,57 triliun dari pagu awal Rp110,95 triliun. Dengan diblokirnya anggaran IKN, kelanjutan proyek ini menjadi tanda tanya besar. Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait dampak pemblokiran anggaran ini terhadap target dan jadwal pembangunan IKN. **(uws)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Hassanuddin Mas'ud Sebut Kaltim Butuh IKN, Banyak Proyek Nasional Dikerjakan di Kalimantan, 09/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) dijelaskan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini.
2. Dalam Pasal 2 UU 3/2022 dijelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:
 - a. menjadi kota berkelanjutan di dunia;
 - b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; danPenjelasan Pasal 2 Huruf b:

Yang dimaksud dengan “penggerak ekonomi Indonesia di masa depan” adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Ibu Kota Nusantara menetapkan strategi ekonomi *superhub* yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.
3. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU 3/2022 pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan;
 - b. keseimbangan ekologi;
 - c. ketahanan;
 - d. keberlanjutan pembangunan;
 - e. kelayakan hidup;
 - f. konektivitas; dan
 - g. kota cerdas.
4. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 diatur bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres

1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:

1. kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam Diktum KETIGA angka 2 Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.